



KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas kekuatan-Nya penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan hasil kerjasama antara bidang terkait di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Catatan Laporan Keuangan (CALK) tersebut memuat beberapa item laporan seperti :

- a. Neraca tahun 2021 dan tahun 2020;
- b. Laporan Perubahan Ekuatas;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Operasional.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini kami sampaikan, semoga dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih, atas bantuan berbagai pihak untuk membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai.

Kasongan, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS,

**WIM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
Bab I PENDAHULUAN	3
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan SKPD	3
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	5-6
Bab II INFORMASI UMUM	7
2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi OPD	7-9
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	9-11
Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	12
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	12-13
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	14
Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15-16
Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	17
5.1 Neraca	17-18
5.1.1 Aset	19-21
5.1.2 Kewajiban	21
5.1.3 Ekuitas	22
5.2 Laporan Perubahan Ekuitas	22
5.2.1 Perubahan Ekuitas	22
5.3 LRA	22
5.3.1 Pendapatan_LRA	22
5.3.2 Belanja	22
5.4 LO	22
5.4.1 Pendapatan_LO	22
5.4.2 Beban	23
5.4.3 Kegiatan Non Operasional	23
5.4.4 Pos Luar Biasa	23
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DI LUAR ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA	24
6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD	24
Bab VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	25
Bab VIII PENUTUP	26-27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi melakukan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca ,dan catatan atas laporan keuangan (*Notes of the Financial Statement*), yang kemudian akan dilakukan konsolidasi oleh Bagian Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas (*cash flow*) serta catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Hal yang paling mendasar dalam laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna utama, dan menjelaskan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dicapai serta juga sebagai perwujudan dari sebuah transparansi, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Landasan Hukum Dalam Penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan untuk Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

BAB II INFORMASI UMUM

- 2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi;
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis penyusunan yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Neraca
 - 5.1.1 Aset;
 - 5.1.2 Kewajiban;
 - 5.1.3 Ekuitas
- 5.2 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.2.1 Perubahan Ekuitas
- 5.3 LRA
 - 5.3.1 Pendapatan LRA
 - 5.3.2 Belanja



5.4 Pendapatan-LO

5.4.1 Pendapatan LO

5.4.2 Beban;

5.4.3 Kegiatan Non Operasional;

5.4.4 Pos Luar Biasa

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI DI LUAR ANTAR MUKA
LAPORAN KEUANGAN UTAMA**

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD

Menjelaskan lebih lanjut apabila OPD ada Menerima dana/barang yang bersumber dari luar APBD, misalnya hibah dan lain-lain yang tidak dianggarkan di APBD.

BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VIII PENUTUP.



BAB II

INFORMASI UMUM

2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan pada tahun 2016 akhir, yang berdasarkan “Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan “

Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan

- Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor: 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan terurai sebagai berikut :

(1) Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, terdiri dari

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Eselon IIIb;
 1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informatika Eselon IVa;
 2. Kepala Seksi E-Government Eselon IVa;
 3. Kepala Seksi Telekomunikasi dan Keamanan Teknologi Informatika Eselon IVa;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Eselon IIIb
 1. Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik Eselon IVa;
 2. Kepala Seksi Kehumasan Eselon IVa;
 3. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Eselon IVa;



- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Eselon IIIb;
 - 1. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Eselon IVa;
 - 2. Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik Eselon IVa;
 - 3. Kepala Seksi Media Publik Eselon IVa;
- d. Kepala Bidang Persandian, dan Statistik Eselon IIIb
 - 1. Kepala Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Eselon IVa;
 - 2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi Eselon IVa;
 - 3. Kepala Seksi Statistik Sektoral Eselon IVa
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tenaga personalia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per tahun 2021 cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dengan beragamnya jenjang pendidikan, seperti pada tabel di bawah.

Tabel 1

**Data Pegawai Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2/ Pasca Sarjana	4 Orang
2	S1/ Sarjana	16 Orang
3	D III/ Diploma	3 Orang
4	SLTA	3 Orang
5	SLTP	1 Orang

Tabel 2

**Data Tenaga Honor/ kontrak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1/ Sarjana	12 Orang
2	D III	1 Orang
3	SLTA	5 Orang
4	SLTP	0 Orang



VISI

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“ Katingan Bermartabat “untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, Maju, Religius, Terintegrasi, Berkesinambungan dan Terbuka.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik;
4. Meningkatkan Kerjasama Antara Masyarakat, Swasta maupun Media Massa dalam Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informatika kepada Masyarakat;
6. Mengoptimalkan Penerapan E-Government.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai Tugas Pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Teknologi dan Informatika, Pengelola Informasi Publik, Pengelola Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Teknologi dan Informatika, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Bidang Persandian dan Statistik;
- b. Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Program di Bidang Teknologi dan Informatika, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Bidang Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan data elektronik;
- d. Pelaksanaan koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media;



- e. Pengawasan/pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Katingan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- f. Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi data seluruh sistem pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
- g. Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
- h. Pelaksanaan pengembangan E-Government dan pemberdayaan telematika;
- i. Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi, telematika, persandian dan aplikasi sistem informasi manajemen kepada Perangkat Daerah;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- k. Pemberian dan pencabutan perizinan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangannya;
- l. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di Bidang Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah dalam penyelenggaraan dibidang statistik;
- q. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapatan pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Telekomunikasi dan informatika;
- w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- x. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;



- y. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- z. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

1. Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah ditargetkan Rp. 250.000.000,00,- Realisasi Rp. 0,-

Sebab Realisasi sampai saat ini Rp. 0,- di karenakan Dasar Payung Hukum untuk penarikan Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi sampai saat ini belum ada.

2. Belanja Daerah

Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2021 Pagu Anggaran ditargetkan menjadi Rp. 9.092.447.346,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 8.194.200.451,00 atau sebesar 90,12 % dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp. 3.261.186.443,00 dari target anggaran sebesar Rp.3.505.661.345,00 atau sebesar 93,03%.
- Belanja Barang dan Jasa realisasinya sebesar Rp. 4.806.811.008,00 dari target anggaran sebesar Rp. 5.460.582.895,00 atau sebesar 88,03%.
- Belanja Modal realisasinya sebesar Rp. 126.203.000,00 dari target anggaran sebesar Rp. 126.203.106,00 atau sebesar 100, 00%.

B. Surplus/Defisit Anggaran terealisasi sebesar (Rp. 8.194.200.451,00) dari target (Rp. 9.092.447.346,00)atau sebesar (90,12 %).

C. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00

D. Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 8.194.200.451,00

E. Sisa Lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 898.246.895,00



Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja daerah :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	Belanja Daerah			
5.1	Belanja Operasi	8.966.244.240,00	8.067.997.451,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.505.661.345,00	3.261.186.443,00	93,03
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.582.895,00	4.806.811.008,00	88,03
5.2	Belanja Modal	126.203.106,00	126.203.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.203.106,00	126.203.000,00	100
	Jumlah 5.1 + 5.2	9.092.447.346,00	8.194.200.451,00	90,12



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang mana tolak ukurnya adalah perbandingan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Beberapa hambatan yang menjadi kendala baik pendapatan maupun belanja tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pendapatan

Tahun Anggaran 2021 sementara ini Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditarget untuk pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan sampai saat ini tidak terealisasi atau Rp. 0,00 disebabkan Dasar Payung Hukumnya atau PERDA nya tidak ada, sehingga realisasinya 0,00 %.

B. Bidang Belanja

1. Kurang matangnya dalam setiap Bidang merencanakan Program dan Kegiatan Anggaran sehingga terdapat beberapa pos rekening belanja atau pendapatan yang seharusnya dianggarkan untuk tolak ukur capaian realisasi, sehingga sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.
2. Lambatnya proses kegiatan yang dilaksanakan sebahagian PPTK sehingga menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai yang diharapkan sampai saat ini.
3. Adanya Pandemi Covid -19 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Maka dari spesialisasi tugas dan tanggung jawab di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan OPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada BPAKD sebagai entitas pelaporan untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Anggaran 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Transaksi Penerimaan Kas
- c. Bagian Kas
- d. Basis Akrua

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Prinsip Nilai Perolehan (*historical cost principle*);
2. Prinsip Realisasi (*realization principle*);
3. Prinsip Substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);
4. Prinsip Periodisitas (*Periodicity principle*);
5. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);
6. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);
7. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Katingan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan tentang pengelola keuangan daerah yang lainnya. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan keuangan. Kebijakan yang diambil tersebut sekurang kurangnya memuat :

- a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. NERACA

Neraca tersaji per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

U R A I A N	SALDO 2021	SALDO 2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Serta Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban di Bayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN**

ASET TETAP		
Tanah	344.300.000,00	344.300.000,00
Peralatan dan Mesin	6.348.027.845,00	6.221.824.845,00
Gedung dan Bangunan	6.762.385.620,00	6.762.385.620,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.341.700,00	775.341.700,00
Aset Tetap Lainnya	29.999.400,00	29.999.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.948.000,00	24.948.000,00
Akumulasi Penyusutan	(7.039.398.719,46)	(5.653.119.491,03)
ASET TETAP	7.245.603.845,54	8.505.680.073,97
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	107.675.000,00	107.675.000,00
Aset Lainnya	3.113.509.000,00	33.216.509.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(101.695.543,88)	(101.695.543,88)
Aumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	3.119.488.456,12	33.222.488.456,12
JUMLAH ASET	10.365.092.301,66	41.728.168.530,09
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.365.092.301,66	41.728.168.530,09
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.365.092.301,66	41.728.168.530,09



5.1.1 Aset

Aset terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan rinciannya :

A. Aset Lancar

1. Kas Bendahara Penerimaan dan Kas Bendahara Pengeluaran
2. Piutang Lain-lain
3. Persediaan

Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Lancar :		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Tanah	344.300.000,00	344.300.000,00



2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Peralatan dan Mesin	6.348.027.845,00	6.221.824.845,00

3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Gedung dan Bangunan	6.762.385.620,00	6.762.385.620,00

4. Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.341.700,00	775.341.700,00

5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Tetap Lainnya	29.999.400,00	29.999.400,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.948.000,00	24.948.000,00

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(7.039.398.719,46)	(5.653.119.491,03)

Penyusutan pada laporan keuangan sebelumnya pada tahun 2021 Rp 6.523.472.446,60 berubah menjadi Rp 7.039.398.719,46. Penyusutan mengalami perubahan terkait dengan kebijakan daerah tentang metode penyusutan yang semula menggunakan metode hitungan hari menjadi metode hitungan tahunan.



C. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Rincian Aset lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah
Aset Lainnya	3.119.488.456,12	33.222.488.456,12	(30.103.000.000,00)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	107.675.000,00	107.675.000,00	0,00
Aset Lain-Lain	3.113.509.000,00	33.216.509.000,00	(30.103.000.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(101.695.543,88)	(101.695.543,88)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.119.488.456,12	33.222.488.456,12	(30.103.000.000,00)

5.1.2 Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Beban, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

5.1.3 Ekuitas

Rincian Perhitungan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah
Ekuitas	10.365.092.301,66	41.728.168.530,09	31.363.076.228,43
Ekuitas	10.365.092.301,66	41.728.168.530,09	31.363.076.228,43

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. (Data Terlampir)

5.3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.3.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Asli Daerah Rp. 0,00

Penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari :

Pendapatan Restribusi Daerah Rp. 0,00

Pendapatan Restribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari restribusi daerah periode TA. 2021

5.3.2. BELANJA

2.1 Belanja Pegawai Rp. 3.261.186.443,00

Nilai tersebut merupakan jumlah total bersih Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi dalam Tahun Anggaran 2021

2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.806.811.008,00

Nilai Barang dan Jasa di atas merupakan jumlah realisasi bersih belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan 31 Desember 2021 dalam Tahun Anggaran 2021.

2.3 Belanja Modal Rp. 126.203.000,00

Belanja Modal di atas merupakan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan 31 Desember 2021

5.4 Pendapatan LO

5.4.1. Pendapatan – LO

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. (Data Terlampir)



5.4.2. Beban

Beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sbb :

- 1. Beban**
- 2. Beban Transfer**

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana lainnya di Luar APBD

Dalam tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sementara ini tidak ada menerima dana / barang yang bersumber dari luar APBD, baik itu berupa hibah dan lain-lain yang tidak dianggarkan di APBD.



**BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Penyajian atas informasi-informasi non keuangan berikut memuat hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan ini, hal-hal tersebut antara lain yaitu :

- 1). Entitas pelaporan dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

- 2). Lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Katingan yaitu terletak pada kompleks perkantoran Kereng Humbang, dan lokasi tersebut sangat strategis jauh dari kemungkinan banjir.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawabsan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek silang antara bidang-bidang terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realisasi dari kebijaksanaan dan Peraturan yang sudah ditetapkan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang- undang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan, sehingga dengan demikian Bupati dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan

Dalam pelaksanaan anggaran 2021 tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dapat diwujudkan, untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.



Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Bagian Keuangan dan Aset sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan diucapkan banyak terimakasih. Sekian.

Kasongan, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Katingan,

WIM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016